IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI DESA GISIK CEMANDI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

Yuli Mardani Isnaini Rodiyah

(Prodi Ilmu Administrasi Negara-FISIP-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jalan Mojopahit 666 B, Sidoarjo email: yuli.mardani77@gmail.com, Isnajusuf@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program pemberdayaan nasional masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP) di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Beberapa key informan dalam penelitian ini antara lain Anggota PK LKM2 PNPM-Mandiri, Anggota LKM, dan Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PNPM-MP ini berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan melalui sumber daya manusia yang memadai, hubungan antara pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat yang saling berkoordinasi dengan baik, karakteristik agen pelaksana dan sikap implementor yang memiliki tanggung jawab tinggi untuk mencapai tujuannya dan mewujudkan cita-cita masyarakat miskin. Faktor pendukung dalam implementasi program ini antara lain pada aspek pembangunan dan berbagai kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat miskin mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah kurangnya kedisiplinan dari masyarakat dan adanya masyarakat yang kurang menjaga lingkungan hidup sehingga kebiasaan yang kurang baik juga tetap dilakukan.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, PNPM-MP

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROGRAM OF URBAN SELF EMPOWERMENT IN THE GISIK CEMANDI VILLAGE, SEDATI SUB-DISTRICT, SIDOARJO REGENCY

ABSTRACT

This research aimed to describe and analyze implementation of The National Program of Urban Self Empowerment (PNPM-MP) in the Gisik Cemandi Village, Sedati Sub-District, Sidoarjo Regency; supporting and inhibiting factor in its implementation. This research used qualitative descriptive research. Key informants in this research included member of event organizer in non-governmental organization (PNPM-MP), *member non-governmental* organization, and head village. The results showed that the implementation of its program was quite good. It is showed that adequate human resources, good coordination between local government, volunteers, and characteristics and attitudes implementor enforcement agencies that have a high responsibility to achieve its objectives and realizing the ideals of the poor. Supporting factors in its program implementation namely development and empowerment activities got a positive response from community. Meanwhile, inhibiting factor wasthe lack of discipline for community and community who are less conserve the environment so that the bad habits also remain to be done.

Keywords: implementation, policy, PNPM-MP

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk ke dalam deretan Negara Sedang Serkembang (NSB), karena memiliki tingkat pendapatan serta tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan nasional Indonesia yang kurang dari US\$975 per kapita. Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab Indonesia masuk kedalam deretan Negara Sedang Berkembang (NSB). Persoalan kemiskinan menjadi persoalan yang rumit di setiap negara terutama bagi negara Indonesia yang memiliki populasi penduduk yang semakin bertambah pada setiap tahunnya, sehingga tidak dapat dipungkiri pemerintah memerlukan usaha yang keras untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena pada dasarnya semakin tinggi penduduk suatu negara akan semakin banyak pula permasalahan yang timbul dalam negara tersebut. Pemerintah tidak hentinya berusaha keras untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dan salah satu progam yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan

di Indonesia adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).

Tujuan umum dari program PNPM ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.Pemerintah berharap para pelaku PNPM-Mandiri dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga program ini benar-benar dapat menanggulangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentunya sangat terkait dengan kinerja para pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mana keberhasilan suatu program pemerintah diukur dari kinerja pemerintahannya itu sendiri. Sehubungan dengan ini dana PNPM-Mandiri dari pusat telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang kemudian di kelola oleh pemerintah desa yang diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk turut mensejahterakan masyarakatnya.

Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai 18 kecamatan. Desa Gisik Cemandi Sedati Sidoarjo merupakan salah satu desa di kabupaten Sidoarjo yang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan, karena pada dasarnya Desa Gisik Cemandi termasuk kedalam daerah pesisir yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, yang diharapkan program ini dapat menanggulangi kemiskinan Di Desa Gisik Cemandi secara berkelanjutan. Selain itu Desa Gisik Cemandi sebagai daerah pesisir yang dapat dikatakan daerah pinggiran karena saat memasuki kawasan desa ini terhitung gelap dan jauh dari keramaian nantinya akan dapat merubah penilaian orang pada umumnya dikarenakan masyarakat Desa Gisik Cemandi yang berubah menjadi masyarakat yang mandiri, kreatif, dan inovatif atas segala sumberdaya alam dan potensi yang dimiliki oleh Desa Gisik Cemandi. Kemudian masyarakat Desa Gisik Cemandi menjadi sadar lingkungan dan dapat lebih berkembang dalam moral pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak.

Kondisi masyarakat miskin di Desa Gisik Cemandi diindikasi dengan salah satunya yaitu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni atau belum memenuhi standart tempat peristirahatan dengan bangunan yang lapuk dan tidah dapat berdiri tegak, bangunan rumah yang tidak permanen atau tidak memiliki hak atas tanah yang ditempati, masih belum terfasilitasi dengan baik dalam hal aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi di Desa Gisik Cemandi. Penilaian Implementasi dari program PNPM-Mandiri Perkotaan di Desa Gisik Cemandi ini mengacu pada pendapat dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Kemudian melalui teori dari Van Meter dan Van Horn ini mengemukakan 6 variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi, serta disposisi implementor yang kemudian disandingkan kedalam aspek lingkungan, sosial dan ekonomi yang kemudian dapat diatasi dalam PNPM-Mandiri Perkotaan yang masuk di Desa Gisik Cemandi.

Hal ini kemudian yang menjadi dasar dari penelitian di Desa Gisik Cemandi ini. Untuk dapat mengetahui bagaimana program penanggulangan kemiskinan ini dapat diterima oleh masyarakat Desa Gisik Cemandi. Selain itu, Desa Gisik Cemandi yang masuk dalam kategori daerah pesisir yang mayoritas masyarakatnya masih berbudaya primitif, kurang berfikir maju, lingkungan yang kotor dan kumuh. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mengangkat judul "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo." Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain bagaimanakah proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo serta apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program pemberdayaan nasional masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP) di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program.

LANDASAN TEORETIS

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.Batasan ini dianggap kurang cukup memberikan pembedaan yang jelas antaraapa yang diputuskan dan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah. Konsep ini mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi.Tindakan yang sebenarnya berada diluar domain kebijakan publik.

Richard Rose berpendapat kebijakan publik sebagai serangkaian yang sedikit banyak berhubungan besertakonsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatukeputusan tersendiri. Kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukansekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Menurut Dunn (2000:25) mengatakan bahwa tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
- c. Tahap Adopsi Kebijakan
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan–tindakan (tanpa tindakan–tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Ripley dan Franklin, 1982:4). Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi menekankan kehidupanny. Pemberdayaan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons: 1994).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri

PNPM adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia melalui sebuah program berbasis pemberdayaan. Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upayapenanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahapperencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

P2KP dilaksanakan sejak tahun1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat danpemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Programini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembagakepemimpinan masyarakat yang representative, mengakar dan kondusif bagi perkembanganmodal sosial (Social Capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalamkemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat./Yang menjadi dasar hukum PNPM MP sebagaimana menjadi dasar hukum PNPM Mandiriadalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunanyang Berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Gisik Cemandi Sedati Sidoarjo. Fokus penelitian ini adalah merujuk pada rumusan masalah yaitu implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri di Desa Gisik Cemandi, faktor penghambat dan pendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. *Key*-informan yang terlibat yaitu Anggota PK LKM2 PNPM-Mandiri (Bapak Tri Muji Luhur), Anggota LKM (Bapak Sumino, Bapak Edi, dan Bapak Nonot), dan Kepala Desa (Bapak Supriadi) sebagai informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo

Standar dan Sasaran Kebijakan PNPM – Mandiri

Program PNPM – Mandiri di Desa Gisik Cemandi berjalan sesuai dengan prosedur, standart dan sasaran yang tepat seperti mendata calon penerima bantuan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ketepatan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, membuat masyarakat merasa lebih diperhatikan dan diberdayakan. Terlebih lagi masyarakat miskin yang menerima bantuan. Dari penelitian dilapangan telah dapat diuraikan bahwa PNPM-Mandiri.

Dalam hal Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi di Desa Gisik Cemandi melalui PNPM-

Mandiri, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dibantu oleh relawan yang bersedia mendukung program ini menyusun PJM-Pronangkis (Program Jangka Menengah-Program Penanggulangan Kemiskinan) yang terbentuk dalam beberapa aspek: a). Aspek Lingkungan; b). Aspek Sosial; dan c). Aspek Ekonomi.

Sumberdaya dalam PNPM – Mandiri

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses melalui mana kesesuaian optimal diperoleh di antara pegawai, pekerjaan organisasi dan lingkungan sehingga para pegawai mencapai tingkat kepuasan dan performansi yang mereka inginkan dan organisasi memenuhi tujuannya. Untuk meningkatkan sumberdaya yang ada di Desa Gisik Cemandi melalui PNPM-Mandiri para relawan membuat sebuah kegiatan yang untuk ibu rumah tangga yang ada di Gisik Cemandi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ibu rumah tangga dapat lebih kreatif daripada sebelumnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat dapat berwirausaha sendiri. Dalam program PNPM-Mandiri di Desa Gisik Cemandi ini sumberdaya non-manusia ditunjukkan dengan kegiatan masyarakat dengan bantuan dana dari swadaya masyarakat yang dimana bantuan dana tersebut digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Gisik Cemandi.

Hubungan antar Organisasi dalam PNPM – Mandiri

Pelaksanaan PNPM-Mandiri di Desa Gisik Cemandi hubungan yang terjadi dalam menjalankan program adalah antara pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat yang dimana mereka saling berkoordinasi dalam pelaksanaan program ini. Dengan tujuan yang sama yaitu mewujudkan cita-cita masyarakat miskin terutama di Desa Gisik Cemandi. Dan hubungan para pelaksana implementasi dengan organisasi lain berjalan dengan baik. Dan sudah seharusnya antar organisasi dapat bersikap saling menguntungkan dan bekerjasama dengan baik agar segala kegiatan dapat berjalan sesuai dengan keinginan.

Karakteristik Agen Pelaksana dalam PNPM – Mandiri

Agen pelaksana dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat "Maju Sejahtera" yang dengan kerelaan hati menjadi agen pelaksana PNPM-Mandiri di Desa Gisik Cemandi. Peran agen pelaksana PNPM sangat baik karena dengan tanggung jawab yang tinggi para relawan menjalankan tugas demi tercapainya tujuan PNPM-Mandiri. Menurut Van Matter dan Van Horn pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informan yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Dan berdasarkan keadaan dilapangan sikap dari agen pelaksana sangat baik dan aktif dalam menjalankan segala kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan dengan adanya sikap baik dari para agen pelaksana proses pengimplementasian program ini dapat berjalan dengan baik.

Kondisi Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi dalam PNPM-Mandiri

Dalam tahap ini faktor lingkungan sosial dalam proses implementasi PNPM-Mandiri di Desa Gisik Cemandi yang menjadi suatu hambatan dalam program. Kebiasaan masyarakat yang primitif hingga sangat lama untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan baru yang jauh lebih layak. Seperti halnya perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan (Agustino, 2006:145). Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi pemicu kegagalan dari kinerja implementasi kebijakan. Dan keadaan dilapangan para pelaksana program telah memberikan dan mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat sekitar, seperti adanya pembangunan MCK umum diperuntukkan untuk masyarakat yang belum memiliki kamar mandi dan tempat pembuangan yang layak, akan tetapi butuh penyesuaian untuk dapat membiasakan diri dengan lingkungan yang baru. Sehingga pada awalnya pembangunan MCK umum belum dapat difungsikan dengan baik oleh masyarakat desa Gisik Cemandi.

Sikap/Kecenderungan (Disposition) Implementor dalam PNPM-Mandiri

Menurut pendapat Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan (implementor) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan, memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi yang tinggi menurut Edward III (1980) dan Van Matter & Van Horn sangat berpengaruh pada keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.Berdasarkan penelitian dilapangan sikap dari pelaksana kebijakan sangat baik dan bertanggungjawab karena pada dasarnya para agen pelaksana dalam hal ini seluruh anggota LSM "Mekar Jaya" melaksanakan tugas dengan suka rela dan penuh tanggung jawab sehingga masyarakat menjadi percaya akan kinerja dari para anggota LSM.

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo

Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo

Suatu program kebijakan pemerintah akan selalu mendapatkan hambatan atau dukungan dari masyarakat. Demikian dengan PNPM – Mandiri di Desa Gisik Cemandi ini selain dukungan dari masyarakat akan tetapi masih ada hal – hal yang menjadi faktor penghambat. Menurut teori Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono (2005:99) menyebutkan beberapa variabel dalam proses implementasi. Segala kegiatan implementasi kebijakan selalu mengalami hambatan dan dukungan dari pihak lain. Faktor penghambat dalam proses implementasi PNPM-Mandiri adalah kurang kedisiplinan dari masyarakat, kemudian juga masih adanya masyarakat yang kurang menjaga lingkungan hidup sehingga kebiasaan yang kurang baik juga tetap dilakukan. Sehingga butuh waktu untuk dapat memperkenalkan kebiasaan yang baik kepada masyarakat Desa Gisik Cemandi.

Faktor Pendukung dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo

Faktor pendukung dalam implementasi PNP-M ialah partisispasi masyarakat yang sangat besar sehingga program dapat berjalan dengan baik. Partisipasi dari masyarakat kemudian dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Desa Gisik Cemandi. Salah satu variabel dalam implementasi adalah kondisi sosial masyarakat yang mendukung program seperti pembangunan yang dilakukan di Desa Gisik Cemandi. Hal yang terjadi di Desa Gisik Cemandi ialah bidang pembangunan seperti adanya drainase, MCK umum dan kegiatan santunan yang diberikan kepada yang berhak dapat berjalan baik akan memudahkan masyarakat. Dengan adanya fasilitas dari LSM tersebut, masyarakat merasa terbantu dan kondisi lingkungan sosial semakin baik.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Standart dan Sasaran Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan di Desa Gisik Cemandi berpacu kepada 3 aspek yaitu aspek lingkungan hidup, aspek sosial dan aspek ekonomi. Yang melalui ketiga aspek masyarakat Desa Gisik Cemandi diberdayakan dan sebagai pendukung perkembangan desa. Sumberdaya dalam program ini meliputi sumberdaya manusia dan alam. Hubungan antar organisasi dalam program ini adalah antara pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat yang dimana mereka saling berkoordinasi dalam pelaksanaan program ini. Karakteristik agen pelaksana dalam program ini yang dapat dikatakan sikap dan tanggungjawab yang tinggi menjadi pendorong keberhasilan progam ini. Kondisi lingkungan hidup, politik dan ekonomi mendukung program sehingga PNPM-Mandiri Perkotaan di Desa Gisik Cemandi berjalan dengan baik. Sikap (*Disposition*) Implementor yang bertanggungjawab membawa program ini mencapai tujuannya dan mewujudkan cita-cita masyarakat miskin terutama di Desa Gisik Cemandi.

Faktor penghambat dan pendukung dari masyarakat dalam implementasi PNPM-Mandiri Perkotaan ini berbagai respon yang diberikan oleh masyarakat. faktor penghambatnya adalah kurang adanya kedisiplinan dari masyarakat serta adanya masyarakat yang kurang menjaga lingkungan hidup sehingga kebiasaan yang kurang baik juga tetap dilakukan. Selain hambatan, program ini juga mendapatkan dukungan dari masyarakat yaitu dari segi pembangunan dan berbagai kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat miskin yang mendapatkan respon positif dari masyarakat.

2. Saran

- a. Diharapkan dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan segala kegiatan pemberdayaan dari aspek lingkungan hidup, aspek sosial dan aspek ekonomi yang telah dilakukan dapat berkelanjutan dan menjadi lebih baik lagi pada tahun-tahun sebelumnya.
- b. Masih adanya hambatan yang terjadi pada program ini diharapkan dapat segera terselesaikan agar masyarakat dapat benar-benar menjadi masyarakat yang berkembang seiring dengan pembangunan daerah yang semakin membaik. Hingga program PNPM-Mandiri Perkotaan di Desa Gisik Cemandi ini benar-benar menjadi program pemerintah dengan hasil maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

Dunn, William. (1999). "Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, hlm. 24-25.

Edward III, George C. (1980). Implementating Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.

Grindle, Merilee S., (ed). (1980). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New jersey: Princetown University Press.

- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society" 6, 1975, London: Sage.
- Subarsono, AG. (2006). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

100 | JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 4, No. 1, Maret 2016, 89-100